

PERATURAN DESA MEKARSARI NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2022



DESA MEKARSARI
KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2023



**PERATURAN DESA MEKARSARI
NOMOR 01 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKARSARI,

- | | | |
|-----------|---|---|
| Menimbang | : | a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setelah tahun anggaran berakhir yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; |
| | | b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022; |
| Mengingat | : | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
| | | 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; |
| | | 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; |
| | | 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; |
| | | 5. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; |
| | | 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa; |
| | | 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa; |
| | | 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa; |
| | | 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; |
| | | 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; |
| | | 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; |
| | | 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata |

- Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 24. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
 25. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 003 Tahun 2020 tentang RPJM Desa tahun 2020 – 2026;
 26. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 002 Tahun 2021 tentang RKPDesa Tahun 2022;
 27. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 004 Tahun 2021 tentang APBDDesa Tahun 2022;
 28. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 004 Tahun 2022 tentang Perubahan APBDDesa Tahun 2022;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARSARI
DAN KEPALA DESA MEKARSARI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARSARI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	0,-
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.901.832.777,-
c. Pendapatan Lain-Lain	Rp.	5.011.813,-
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.906.844.590,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	978.659.471,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	322.850.000,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	73.550.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	191.040.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	Rp.	333.118.031,-
Jumlah Belanja	Rp.	1.899.217.502,-
Surplus/Defisit	Rp.	7.627.088,-

3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	2.024.546,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(2.024.546,-)
Silpa Tahun Berjalan	Rp.	9.651.634,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 30 Desember 2022;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Mekarsari
Pada tanggal 18 Januari 2023

KEPALA DESA MEKARSARI

AAN ANDRES SATRIAJI

Diundangkan di Desa Mekarsari
Pada Tanggal 18 Januari 2023
SEKRETARIS DESA,

OTONG SUGIANTO

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD DESA MEKARSARI

TENTANG
PERATURAN DESA MEKARSARI NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA MEKARSARI KECAMATAN CIMERAK
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : AAN ANDRES SATRIAJI, S.IP
Jabatan : Kepala Desa Mekarsari
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : SALEH, S.IP
Jabatan : Ketua BPD Desa Mekarsari
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah mengajukan Rancangan Peraturan Desa Mekarsari Nomor : 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022, Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran kepada PIHAK KEDUA untuk dibahas dan disepakati bersama.
2. PIHAK KEDUA bersama PIHAK PERTAMA telah membahas Rancangan Peraturan Desa Mekarsari Nomor : 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.
3. PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Mekarsari Nomor : 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022, Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak yang telah disusun dan diajukan oleh PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan kesepakatan tersebut di atas, maka Rancangan Peraturan Desa Mekarsari 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Mekarsari, 18 Januari 2023
PIHAK PERTAMA

SALEH, S.IP

AAN ANDRES SATRIAJI, S.IP

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA
DESA MEKARSARI KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DAFTAR ISI

- I. LAPORAN REALISASI APBDes
- II. CATATAN ATAS LAPORAN
 - A. Informasi Umum
 - B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
 - C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas
 - 2. Pendapatan Asli Desa
 - 3. Dana Desa
 - 4. Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah
 - 5. Alokasi Dana Desa
 - 6. Bantuan Keuangan Propinsi
 - 7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
 - 8. Pendapatan Lain lain
 - 9. Belanja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa
 - ☐ Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - ☐ Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
 - ☐ Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa
 - ☐ Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - ☐ Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi
 - ☐ Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
 - ☐ Pembiayaan
 - ☐ Aset Desa
 - ☐ Penyertaan Modal Desa

LAMPIRAN

- Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa
- Lampiran 2 - Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember 2022
- Lampiran 3 - Program Sektoral, Program Daerah & Program Lainnya yang masuk ke desa